

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang paling mendasar dan terus menjadi tantangan serius bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun pemerintah dan berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkannya, masih terdapat sebagian masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, perumahan layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Todaro dan Smith (2020), menyatakan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya kualitas hidup individu, ditandai dengan kekurangan nutrisi, tingkat pendidikan rendah, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Kemiskinan muncul sebagai akibat dari ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Ketika sebagian besar kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka kelompok masyarakat miskin akan semakin terpinggirkan. Hal ini diperparah oleh distribusi kesempatan yang tidak merata, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan lemahnya infrastruktur pendukung (Kadji, 2020).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Barbier dan Hochard (2016), menegaskan bahwa kemiskinan dapat menghambat tercapainya pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Banyak faktor yang

menyebabkan kemiskinan sulit untuk dihilangkan salah satunya karena kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah (Andhykha *et al.*, 2018).

Meskipun angka kemiskinan nasional terus menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya, namun laju penurunannya masih tergolong lambat, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan timur Indonesia. Data BPS tahun 2025 mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 turun menjadi 8,47%, namun angka kemiskinan pedesaan masih mencapai 11,03%, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada pada 6,73%. Penurunan kemiskinan di pedesaan pun hanya sebesar 0,31 poin dalam enam bulan terakhir, menunjukkan bahwa percepatannya relatif rendah. Kondisi ini juga terlihat jelas di kawasan timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana persentase penduduk miskin pada September 2024 masih mencapai 19,02%, dengan tingkat kemiskinan di pedesaan bahkan berada pada angka 23,02% (Badan Pusat Statistik, 2025).

Selain itu, kemiskinan di Indonesia juga rentan dipengaruhi oleh guncangan eksternal, seperti krisis ekonomi global, pandemi, maupun bencana alam. Seperti pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu telah menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat hilangnya mata pencaharian dan penurunan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia memerlukan kebijakan yang adaptif, tanggap terhadap risiko, dan menitikberatkan pada perlindungan sosial bagi kelompok rentan (Badan Pusat Statistik, 2025).

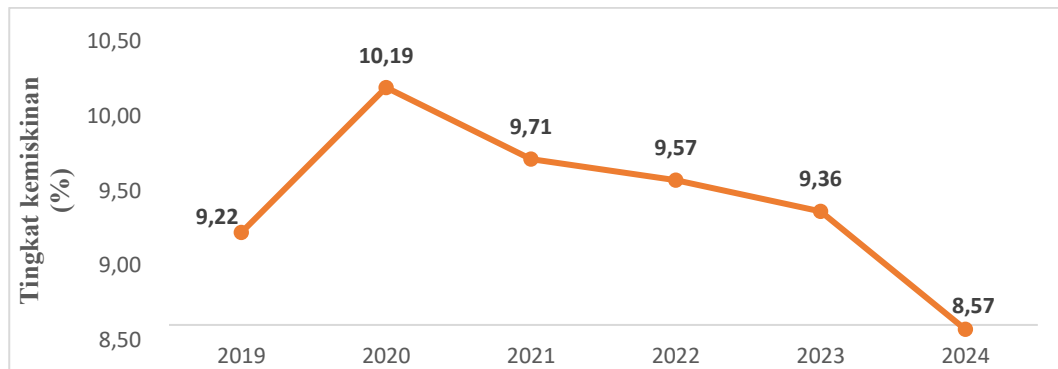
Berbagai program telah dijalankan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan. Namun, efektivitas program-program yang dibentuk perlu terus

ditingkatkan dan diselaraskan dengan upaya pengendalian inflasi, penurunan ketimpangan pendapatan, serta kebijakan pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar strategi pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan kebijakan terpadu yang memperhatikan stabilitas harga, pemerataan pendapatan, dan pelestarian lingkungan, diharapkan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat semakin berkurang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara adil dan merata (Teguh *et al.*, 2018).

Banyak studi empiris telah dilakukan terkait faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan pendapatan per kapita, tetapi juga oleh faktor pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, serta tingkat pengangguran. Selain itu, efektivitas kebijakan pemerintah seperti belanja publik dan program pembangunan juga sering dikaitkan dengan kemampuan menekan angka kemiskinan (Maskur *et al.*, 2023; Mustaqimah *et al.*, 2018; Budhijana, 2019; Panggabean & Matondang, 2019; Wahyuni & Soleh, 2021).

Hasil dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan temuan yang beragam dan tidak konsisten, di mana beberapa studi telah meneliti pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan (Mustaqimah *et al.*, 2018), (Panggabean & Matondang, 2019). Demikian pula variabel pembangunan manusia seperti IPM dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap kemiskinan (Nailufar & Nastiti, 2023; Maskur *et al.*, 2023; Anam & Feriyanto, 2025; Wahyuni & Soleh, 2021).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan variabel pengeluaran pemerintah, IPM, angka partisipasi sekolah, dan pendapatan per kapita. Adapun perkembangan tingkat kemiskinan Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2019-2024 (Persen)

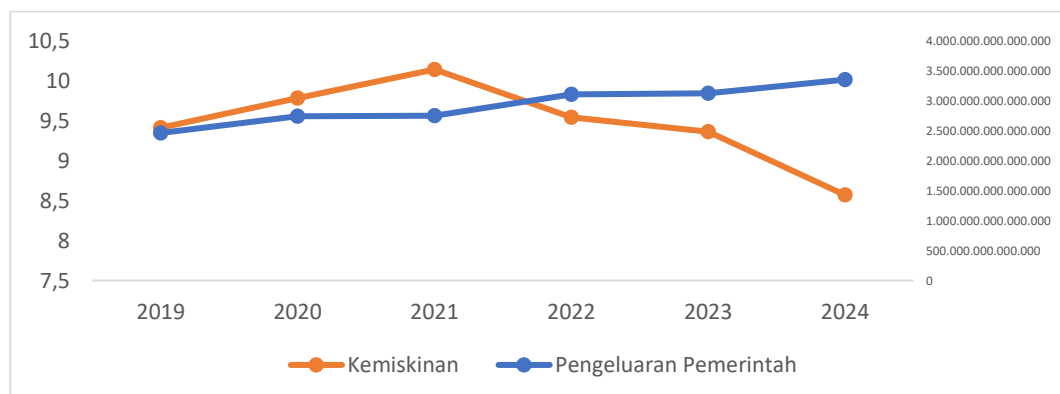
Sumber: BPS, (2025)

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 10,19 persen. Kondisi ini muncul akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran, serta melemahnya daya beli masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Indonesia turun tajam menjadi 9,71 persen, yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian nasional, pelonggaran aktivitas masyarakat, serta efektivitas berbagai program bantuan sosial melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2024 kembali menurun yaitu menjadi 8,57 persen, yang diakibatkan oleh stabilnya pertumbuhan ekonomi, membaiknya pendapatan rumah tangga, serta penguatan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran (BPS, 2025)

Kemiskinan juga erat kaitannya dengan isu ketimpangan. Mankiw (2018), menyatakan bahwa kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang semakin melebar dapat memperparah tingkat kemiskinan, terutama di negara berkembang. Ketika distribusi pendapatan tidak merata, masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin sulit keluar dari jurang kemiskinan. Hal ini juga relevan dengan kondisi di Indonesia, dimana ketimpangan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan nasional.

Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan tingkat kemiskinan diantaranya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per kapita akan mendorong peningkatan pengeluaran dan peran pemerintah, khususnya dalam penyediaan sektor sosial yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan (Panggabea & Matondang, 2019).

Adapun perkembangan pengeluaran pemerintah dan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2024

Sumber: BPS, (2025)

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa pada tahun 2020 pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan, namun tingkat kemiskinan justru ikut naik hingga mencapai titik tertinggi selama periode pengamatan. Kondisi ini terjadi karena meskipun belanja pemerintah meningkat, sebagian besar diarahkan untuk penanganan darurat pandemi Covid-19 sehingga belum mampu secara langsung menekan kemiskinan. Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi menurun tajam, angka pengangguran meningkat, dan daya beli masyarakat melemah, sehingga kenaikan pengeluaran pemerintah tidak serta-merta menurunkan kemiskinan.

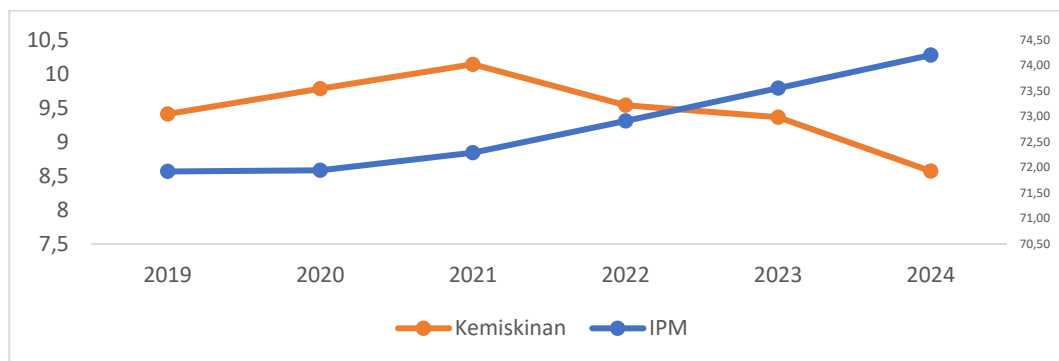
Selanjutnya, pada tahun 2022 pengeluaran pemerintah kembali meningkat dan diikuti oleh penurunan kemiskinan yang cukup tajam Rp. 3.106.425.255.592. Penurunan ini disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian nasional, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi yang semakin efektif sehingga belanja pemerintah mampu mendorong perbaikan kesejahteraan. Kemudian, pada tahun 2024 pengeluaran pemerintah terus bertambah dan diiringi oleh penurunan kemiskinan. Hal ini dipengaruhi oleh stabilnya pertumbuhan ekonomi, membaiknya pendapatan rumah tangga, serta penguatan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, sehingga peningkatan belanja pemerintah memberikan dampak yang lebih optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Selain pengeluaran pemerintah, kemiskinan juga di pengaruhi oleh indeks pembangunan manusia. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia yaitu indeks pembangunan manusia yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari segi daya beli masyarakat.

Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan mengalami peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sifat antar individu, disparitas dari segi geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam macam sehingga mengakibatkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan.

Kualitas sumber daya manusia yang direpresentasikan indeks pembangunan manusia dapat berpengaruh pada kemiskinan. Jika IPM rendah dapat mengakibatkan produktivitas kerja rendah. Produktivitas yang rendah memberikan dampak pada pendapatan masyarakat, di mana pendapatan yang diperoleh menjadi rendah. yang pada gilirannya menyebabkan tingginya angka kemiskinan (Panggabea & Matondang, 2019).

Adapun perkembangan indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 3 IPM dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2024
Sumber: BPS, (2025)

Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat bahwa pada tahun 2020 hingga 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, sementara tingkat kemiskinan juga naik. Kondisi ini terjadi karena pada masa pandemi Covid-19, peningkatan IPM lebih banyak dipengaruhi oleh indikator pendidikan dan kesehatan yang tetap

mengalami perbaikan melalui perluasan akses layanan publik dan adaptasi digital, meskipun kondisi ekonomi masyarakat melemah. Namun, meningkatnya pengangguran, menurunnya pendapatan rumah tangga, serta terbatasnya aktivitas ekonomi menyebabkan kenaikan kemiskinan tidak terhindarkan meskipun IPM menunjukkan perbaikan.

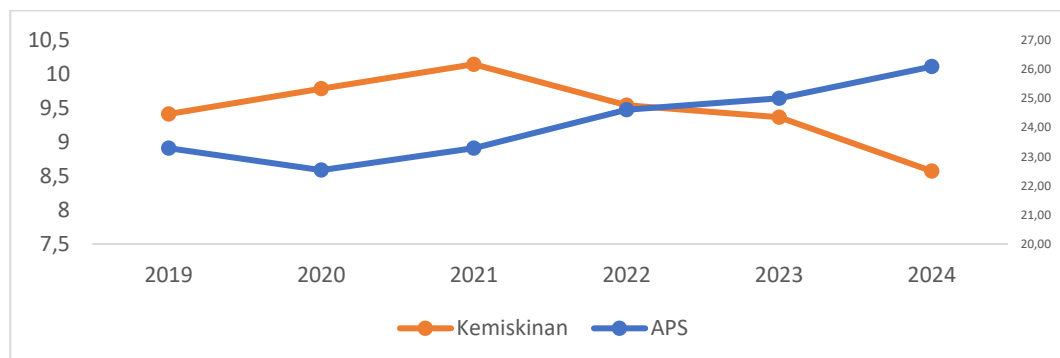
Selanjutnya, pada tahun 2022 IPM meningkat cukup tajam dan diikuti oleh penurunan kemiskinan. Hal ini tidak terlepas dari pemulihan ekonomi nasional, meningkatnya produktivitas masyarakat, serta meningkatnya daya beli yang mendorong kesejahteraan masyarakat. IPM yang membaik terutama dari sisi pendidikan dan umur harapan hidup semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia sehingga penurunan kemiskinan pun lebih cepat terjadi. Kemudian pada tahun 2024 terlihat bahwa IPM terus mengalami kenaikan dan diiringi dengan penurunan kemiskinan yang lebih tajam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang semakin baik, ditandai dengan meningkatnya akses kesehatan, pendidikan, serta kualitas hidup, memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu angka partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah yang rendah memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara negatif, dampak terburuknya ialah menambah jumlah kemiskinan di suatu wilayah. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menghambat pembangunan di suatu wilayah. Peningkatan akses pendidikan dan peningkatan taraf pendidikan masyarakat dapat menjadi tolok ukur keberhasilan perkembangan menurut pendapat Giovanni (2018). Tingkat pendidikan yang rendah dapat

berdampak pada rendahnya upah dan minimnya produktivitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhannya Made Ariasih & Yuliarmi, (2021).

APS (Angka Partisipasi Sekolah) mempengaruhi angka kemiskinan secara signifikan, memperlihatkan bahwa apabila presentase APS naik maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan. Kebalikannya apabila presentase APS turun maka tingkat kemiskinan akan naik. Secara teoritis bisa diambil kesimpulan bahwasanya faktor pendidikan memengaruhi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. APS menunjukkan bahwasanya pengaruh pendidikan tergolong signifikan terhadap kemiskinan, maka perlu adanya pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga akan membantu mengurangi angka kemiskinan (Marwatika & Setyowati, 2025).

Adapun perkembangan Angka Partisipasi sekolah dan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 4 APS dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2024

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia*, 2025

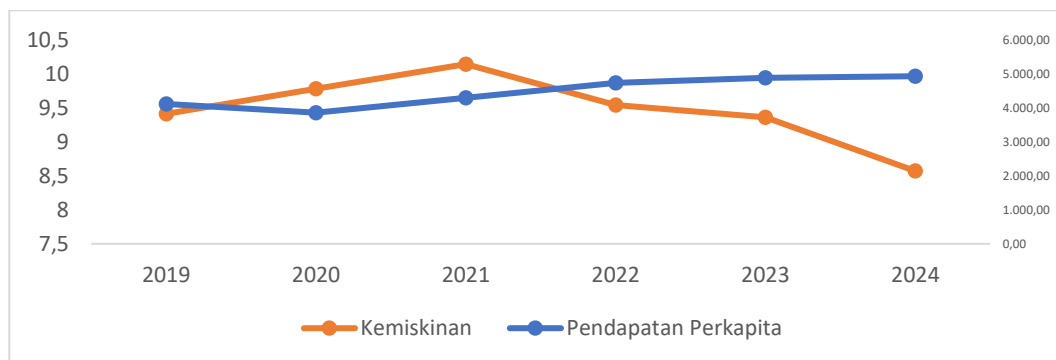
Berdasarkan data APS dan tingkat kemiskinan tahun 2019–2024 menunjukkan adanya peningkatan pada umumnya

. Pada tahun 2020, APS menurun dari 23,28 menjadi 22,53, sementara tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78%. Kondisi ini terjadi karena pandemi Covid-19 mengakibatkan pembatasan aktivitas belajar tatap muka, kendala akses pembelajaran daring, serta meningkatnya beban ekonomi keluarga yang menyebabkan sebagian pelajar tidak dapat mengikuti pendidikan secara optimal.

Selanjutnya, pada tahun 2021 APS kembali meningkat menjadi 23,28, namun kemiskinan masih naik mencapai 10,14%. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan aktivitas sekolah belum langsung diikuti oleh perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga. Memasuki tahun 2022 dan 2023, APS terus meningkat menjadi 24,60 dan 24,99, dan disertai dengan penurunan kemiskinan menjadi 9,54% dan 9,36%.

Hubungan antara variabel pendapatan perkapita dengan kemiskinan dapat menimbulkan perbedaan yang negatif, Semakin besar pendapatan perkapita yang dihasilkan dan didorong dengan produktifitas dan tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga semakin besar taraf hidup masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hal ini tentu dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Tamrin, 2001)

Adapun perkembangan pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 5 Pendapatan perkapita dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2024

Sumber: BPS, (2025)

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di Indonesia secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara tingkat kemiskinan (KM) cenderung menurun setelah sempat meningkat pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2019, pendapatan per kapita Indonesia tercatat sebesar 4.106,95 USD dengan tingkat kemiskinan 9,41 persen. Fenomena penurunan pendapatan per kapita terlihat pada tahun 2020, yaitu turun menjadi 3.853,70 USD, sedangkan tingkat kemiskinan justru meningkat menjadi 9,78 persen. Kondisi ini menggambarkan dampak nyata pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional, di mana pertumbuhan ekonomi melemah, aktivitas produksi menurun, dan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan atau pendapatan.

Pada tahun 2021, pendapatan per kapita meningkat menjadi 4.287,17 USD, tingkat kemiskinan tetap tinggi mencapai 10,14 persen, yang menandakan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya tren positif di mana pendapatan per kapita meningkat dari 4.730,83 menjadi 4.925,43 USD, sementara tingkat kemiskinan menurun dari 9,54 persen

menjadi 8,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan, artinya ketika pendapatan masyarakat meningkat, jumlah penduduk miskin cenderung menurun.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Angka Partisipasi Sekolah dan Pendapatan Perkapita terhadap Kemiskinan di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimanakah pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimanakah pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Bagaimanakah pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengetahui pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Maka Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan yang terkait dengan pengaruh pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia, angka partisipasi sekolah dan pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang ekonomi khususnya ekonomi pembangunan yang berhubungan dengan Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia, angka partisipasi sekolah dan pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
2. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan penting bagi masyarakat dalam memahami berbagai faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia.